



News Title : Bursa Berjangka CPO Diluncurkan Juni 2023, Zulkifli Hasan: Mudahkan Pengusaha Tingkatkan Perdagangan

Media Name : Tribunnews.com

Journalist : Endrapta Ibrahim Pramudhi

Publish Date : 07 June 2023

Tonality : Positive

News Page :

News Value : 0

Resources : Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)

Ads Value : 0

Section/Rubrication : Bisnis

Topic : Bursa CPO

[Home](#)
[Bisnis](#)
[News](#)

Bursa Berjangka CPO Diluncurkan Juni 2023, Zulkifli Hasan: Mudahkan Pengusaha Tingkatkan Perdagangan

Rabu, 7 Juni 2023 11:36 WIB

Penulis: [Endrapta Ibrahim Pramudhi](#)
Editor: [Seno Tri Sulistyono](#)



[Lihat foto](#)

Ukuran Digital

Rutresi: Harga acuan untuk komoditas CPO saat ini masih mengacu ke Pasar Fisik Rotterdam dan Pasar Berjangka di Kuala Lumpur (MDEX) sebagai basis penetapan harga CPO dunia.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) **Zulkifli Hasan** mengatakan, bursa berjangka yang diluncurkan Juni 2023 mendatang dapat menjadi pembentuk harga patokan CPO.

Ia berujar, keberadaan ekspor CPO melalui bursa berjangka akan mempermudah pengusaha.

"Keberadaan ekspor CPO melalui bursa berjangka akan mempermudah pengusaha, meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta pada akhirnya meningkatkan perdagangan Indonesia," kata Zulhas, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Bursa CPO Dinilai Hanya Untungkan Asing, Petani dan Pelaku Usaha Makin Terpuruk

Zulhas mengungkapkan, saat ini ekspor masih surplus meskipun tidak terlalu besar karena kondisi perekonomian global yang sedang melemah.

Maka dari itu, diperlukan inovasi-inovasi seperti pengalihan perdagangan dari pasar tradisional ke nontradisional seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika.

Hal ini diperlukan karena mulai banyak aturan-aturan yang mempersulit ekspor seperti adanya kebijakan sertifikasi di Eropa dan Amerika.

"Selain pengalihan pasar dari tradisional ke nontradisional perlu juga memperkuat kebijakan ekspor Indonesia. Salah satunya melalui kebijakan ekspor CPO karena CPO merupakan salah satu penyumbang surplus neraca perdagangan," ujar Zulhas. Menurut dia, sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, sudah seleyaknya Indonesia memiliki harga acuan untuk CPO sendiri.



Namun, kondisi yang ada sekarang menunjukkan bahwa Indonesia belum berperan dalam memberikan harga acuan yang diakui di pasar dunia.

Harga acuan untuk komoditas CPO saat ini masih mengacu ke Pasar Fisik Rotterdam dan Pasar Berjangka di Kuala Lumpur (MDEX) sebagai basis penetapan harga CPO dunia.

"Berkaitan dengan kebijakan tersebut diperlukan berbagai masukan agar ekspor CPO melalui bursa tidak merugikan pelaku usaha CPO. Proses bisnis yang ada sekarang tidak banyak berubah kecuali mewajibkan ekspor CPO melalui bursa berjangka," kata Zulhas.

"Kebijakan kewajiban pemenuhan DMO (Domestic Market Obligation) masih berlaku, sehingga eksportir tetap wajib memiliki HE terlebih dahulu. Diharapkan pelaku usaha dapat mendukung keberadaan pengaturan ekspor CPO melalui bursa berjangka ini," lanjutnya.